

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak era reformasi yang dimulai Pada tahun 1998, bangsa Indonesia telah maju selangkah lagi menuju era keterbukaan. Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada badan - badan pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang - Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat (1) tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja untuk dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan

keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket Undang-Undang Keuangan Negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja. Dalam membiayai kegiatan dan pelaksanaan tugasnya, pemerintah Kabupaten Belu memperoleh alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Basis akrual digunakan pemerintah sebagai standar atau acuan dalam penyusunan laporan keuangan daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai upaya pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban pengeolalaan keuangan daerah secara akuntabilitas dan transparansi. Agar kinerja pegawai dalam penyusunan laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan maka hal yang perlu diperhatikan adalah pemahaman dari pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan yang diterapkan, dalam hal ini adalah akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Hal ini bertujuan agar dalam penyusunan laporan keuangan daerah berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintahan dan laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.

Faktor penting yang juga dapat mempengaruhi kinerja dari penyusunan laporan keuangan daerah adalah kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan tersebut, salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan mengadakan pelatihan untuk pegawai di lingkungan kerja pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kecakapan pegawai dalam melakukan pekerjaan.



Latar belakang pendidikan seseorang dapat berpengaruh terhadap perilaku dan cara berpikir seseorang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik umumnya bersikap berdasarkan ilmu yang dimiliki dan apa yang diketahui. Dalam penyusunan laporan keuangan daerah latar belakang pendidikan merupakan faktor yang bisa mempengaruhi kreatifitas seseorang dalam hal pengambilan keputusan. Dalam penyusunan laporan keuangan daerah, penyusunan laporan keuangan daerah hendaknya memiliki pendidikan yang sesuai dengan pekerjaannya dan dapat mendukung kinerjanya di dalam penyusunan laporan keuangan yang dalam hal ini adalah latar belakang pendidikan akuntansi.

Selain itu ada juga sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan teknologi informasi yang memadai untuk membantu sistem akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual agar dapat berjalan dengan lancar.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Belu?



2. Apakah sistem teknologi informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Belu?
3. Apakah pelatihan kerja berpengaruh terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Belu?
4. Apakah latar belakang pendidikan, sistem teknologi informasi akuntansi dan pelatihan kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Belu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh latar belakang pendidikan pada kinerja penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Belu.
2. Untuk menguji pengaruh sistem teknologi informasi akuntansi pada kinerja penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Belu.
3. Untuk menguji pengaruh pelatihan kerja pada kinerja penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Belu.
4. Untuk menguji pengaruh latar belakang pendidikan, sistem teknologi informasi akuntansi dan pelatihan kerja secara simultan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Belu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Akademisi
 - Dapat memberikan masukan mengenai kebijakan akuntansi yang tepat dalam usaha untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyajian laporan keuangan berbasis akrual.



- Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang tata cara penyajian laporan keuangan berbasis akrual serta untuk menambah wawasan dalam perbandingan antara teori dan praktik yang ada di lapangan.

2. Praktisi:

- Sebagai bahan referensi dan acuan serta informasi tambahan khususnya untuk penelitian di masa yang akan datang pada pemerintahan yang bergerak di bidang yang sama.
- Menjadi masukan bagi Kabupaten Belu khususnya SKPD di Kabupaten Belu dalam penyajian laporan keuangan berbasis akrual.